

PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

DINAS PERHUBUNGAN



**LAPORAN KEUANGAN
KEUANGAN**

**SEMESTER I
TAHUN ANGGARAN 2020**

KATA PENGANTAR

Sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan dan Permendagri nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang telah diubah dengan Permendagri nomor 21 tahun 2011 tentang perubahan kedua atas Permendagri nomor 13 tahun 2006.

Sebagai wujud pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan pemerintah daerah, Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban menyusun laporan keuangan untuk disampaikan kepada Kepala Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan Atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung ini mengacu pada Peraturan Pemerintah nomor 64 tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah. Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Pengelolaan Keuangan Daerah pada Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung. Disamping itu laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalpinang, 30 Juni 2020
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selaku Pengguna Anggaran

KA. TAJUDDIN, SH MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 199011 1001



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERHUBUNGAN

Komplek Perkantoran Terpadu Pemerintahan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Air Itam pangkalpinang Telp (0717) 437442 Fax (0717) 439279

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terdiri dari :

- (a) Laporan Realisasi Anggaran;
- (b) Neraca;
- (c) Laporan Operasional;
- (d) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- (e) Catatan atas Laporan Keuangan Semester I Tahun Anggaran 2020

sebagaimana terlampir adalah tanggungjawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan Sistem Pengendalian Intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalpinang, 30 Juni 2020

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
Selaku Pengguna Anggaran

KA. TAJUDDIN, SH MH
Pembina Utama Madya
NIP. 19640324 199011 1001

DAFTAR ISI

	Hal
Kata Pengantar	1
Pernyataan Tanggung Jawab	2
Daftar Isi	3-4
Daftar Tabel	5
 BAB I PENDAHULUAN	
A.1 Penjelasan Umum	6-7
A.2 Dasar Hukum	8
A.3 Kebijakan Fiskal/ Keuangan dan Ekonomi Makro	9-12
A.4 Kebijakan Akutansi	13-19
 BAB II PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN REALISASI ANGGRAN (LRA)	
B.1 Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	20
B.2 Penjelasan Pos Laporan Realisasi anggaran (LRA)	21-22
B.3 Catatan Penting Lainnya	23
 BAB III PENJELASAN POS POS NERACA	
C.1 Penjelasan Umum Neraca	24
C.2 Penjelasan Per Pos Neraca	24-31
C.3 Catatan Penting Lainnya	32
 BAB IV PENJELASAN ATAS POS POS LAPORAN ARUS KAS	
D.1 Ikhtisar Laporan Arus Kas	33
D.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas	33-36
D.3 Catatan Penting Lainnya	
 BAB V PENJELASAN POS-POS LAPORAN KEUANGAN OPERASIONAL	
E.1 Ikhtisar Laporan Operasional	37
E.2 Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas	37-40
E.3 Catatan Penting Lainnya	41

BAB VI PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

F.1	Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas	42
F.2	Penjelasan per Pos laporan	42-43

DAFTAR TABEL		
		Hal
TABEL 1	Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran	7
TABEL 2	Masa Manfaat Aset Tetap	17
TABEL 3	Pencapaian Kinerja Keuangan Semester I TA 2020	23
TABEL 4	Rincian Aset Teatap Per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019	25
TABEL 5	Rincian Beban Operasional Per-31 Desember 2019	38

BAB I

PENDAHULUAN

A.1 Penjelasan Umum

Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk di dalamnya adalah segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah terkait dengan pelaksanaan perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang merupakan realisasi pelaksanaan program/kegiatan tahunan daerah yang ditetapkan berdasarkan peraturan daerah.

Catatan atas Laporan Keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas harus mempunyai referensi silang dengan informasi yang terkait dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Catatan atas Laporan Keuangan meliputi penjelasan atau daftar rinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Termasuk pula dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas Laporan Keuangan, seperti kewajiban kontinjensi dan komitmen-komitmen lainnya.

Fungsi Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah untuk menyajikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan (BAKUDA,DPRD, Pemerintah Pusat, Masyarakat Umum dan kebutuhan intern Pemerintahan Daerah) dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial, maupun politik dengan:

- a. Menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal/keuangan, ekonomi regional/ekonomi makro, pencapaian target peraturan daerah mengenai APBD, berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target.
- b. Menyajikan ikhtisar pencapaian kinerja keuangan selama tahun pelaporan.
- c. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya.
- d. Mengungkapkan informasi untuk pos-pos asset dan kewajiban yang timbul sehubungan dengan penerapan basis akrual atas pendapatan dan belanja dan rekonsiliasinya dengan penerapan berbasis Akrual.

- e. Menyediakan informasi tambahan yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan.

Komponen-komponen Laporan Keuangan Pokok terdiri dari :

- 1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
- 2. Neraca
- 3. Laporan Operasional (LO)
- 4. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)
- 5. Catatan atas Laporan Keuangan

Laporan Keuangan disajikan dengan periode yang lebih panjang atau lebih pendek dari setahun, entitas pelaporan perlu mengungkapkan informasi sebagai berikut ;

- 1. Alasan penggunaan pelaporan tidak satu tahun.
- 2. Fakta bahwa jumlah komparatif untuk laporan tertentu seperti Arus Kas dan catatan-catatan terkait tidak dapat diperbandingkan.

Tujuan Umum Laporan Keuangan adalah menyajikan informasi mengenai Posisi Keuangan, Realisasi Anggaran, Arus Kas dan Kinerja Keuangan suatu Entitas Pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai Alokasi Sumber Daya.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 30 Juni 2020 ditetapkan bahwa :

Tabel 1
Ringkasan Laporan realisasi Anggaran

NO.	URAIAN		ANGGARAN	REALISASI
1.	Pendapatan	Rp. -	Rp. -	Rp. -
2.	Belanja Tidak Langsung	Rp. 7.985.103.172,00	Rp. 7.985.103.172,00	Rp. 3.638.420.587,00
3.	Belanja Langsung	Rp. 31.527.349.629,00	Rp. 12.850.183.233,00	Rp. 17.09.814.161,00
4.	Surplus/(Defisit)	Rp.	Rp. -	Rp. -
Jumlah		Rp. 39.512.452.801,00	Rp. 20.835.286.405,00	Rp. 5.348.234.748,00

Penyusunan Laporan Keuangan dilakukan dengan cara, yaitu:

Pengungkapan untuk masing-masing pos pada laporan keuangan mengikuti kebijakan yang berlaku yang mengatur tentang pengungkapan untuk pos-pos yang berhubungan. Pos belanja dilakukan dengan mengkompilasikan data yang diterima dari Bendahara Pengeluaran.

Data yang dihimpun adalah data yang telah diotorisasi oleh pejabat yang berwenang, dengan didukung dokumen dan lampiran yang lengkap yang ada pada Bendahara Pengeluaran yang terkait. Setelah itu dilakukan beberapa pengujian dan konfirmasi ulang dan akan dikoreksi kembali bila terjadi perbedaan dengan catatan Bendahara Pengeluaran tersebut.

Informasi pada laporan keuangan ini belum tentu sempurna, namun telah dicoba untuk disajikan secara hati-hati dan cermat sesuai dengan acuan yang ada, dengan tujuan untuk melaksanakan pertanggungjawaban sesuai dengan amanat dari peraturan yang berlaku. Dalam perjalanannya apabila ada beberapa aspek yang perlu diperbaiki, maka akan diperbaiki melalui jurnal koreksi atas pos-pos laporan keuangan dan pada akhirnya semua pencatatan dapat menunjukkan kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

Kebijakan akuntansi transaksi dan kejadian yang dipakai dengan menggunakan basis akrual. Dimana dalam Standar Akuntansi yang berbasis akrual yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

A.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang – Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahn Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Peraturan pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 70 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 74 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
11. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 81 Tahun 2017 tentang Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah.

A.3 Kebijakan Fiskal / Keuangan dan Ekonomi Makro

1. Ekonomi Makro

Pengertian Ekonomi Makro adalah studi tentang ekonomi secara keseluruhan, menjelaskan perubahan ekonomi yang mempengaruhi rumah tangga dan perusahaan.

Ekonomi makro dapat digunakan untuk menganalisis cara terbaik untuk mempengaruhi target-target kebijakan seperti pertumbuhan ekonomi, stabilitas harga, tenaga kerja dan pencapaian keseimbangan neraca yang berkesinambungan.

Kondisi Ekonomi Makro yang perlu diungkapkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan adalah asumsi-asumsi indikator ekonomi makro yang digunakan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berikut tingkat pencapaiannya. Indikator ekonomi makro tersebut antara lain product domestic bruto ,produk harga minyak, tingkat suku bunga dan neraca pembayaran.

Akibat pengaruh kenaikan dolar terhadap rupiah sangat berdampak sekali pada ekonomi Indonesia secara Makro mengakibatkan daya beli masyarakat cukup rendah, akan tetapi pertumbuhan dan inflansi dapat terjaga dengan baik sehingga hal-hal yang diinginkan tidak terjadi

Kondisi ekonomi secara regional ,pertumbuhan ekonomi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melambat diakibatkan perlambatan kinerja lapangan usaha utama yang tumbuh terbatas, seperti industri pengolahan pertanian, kehutanan dan perikanan, perdagangan besar dan pertambangan . Tingkat Inflansi diperkirakan masih bisa dikendalikan

Peran serta Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap pertumbuhan ekonomi dan inflansi yang tertinggi adalah bagaimana memantapkan ketahanan ekonomi di daerah yang substansinya untuk mengantisipasi terjadinya gejolak sosial dimasyarakat yang diakibatkan oleh terpuruknya perekonomian masyarakat yang dapat mengancam

keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) dengan melakukan kegiatan-kegiatan sosialisasi seperti pengawasan pemantauan ketahanan ekonomi dengan melibatkan unsur Dinas Perhubungan Provinsi, Kabupaten/Kota terkait, organisasi kepemudaan forum kewaspadaan dini masyarakat, forum kerukunan umat beragama, forum pembauran

Kesinambungan ketersediaan jasa transportasi di seluruh wilayah merupakan hal yang mutlak karena fungsi strategis transportasi ikut menciptakan stabilitas dan kelangsungan kegiatan masyarakat serta roda pemerintahan, Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa peran transportasi sebagai penghubung memiliki dampak yang besar dan dapat langsung dirasakan masyarakat. Tak dipungkiri lagi, hampir semua melakukan aktivitas dengan menggunakan transportasi, karena bisa mempermudah masyarakat untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain hingga ke pelosok Indonesia. Transportasi pun tidak hanya dipergunakan untuk mengangkut manusia, tetapi juga muatan barang. Pembangunan infrastruktur transportasi juga memberikan dampak positif bagi masyarakat seperti membuka kesempatan ekonomi, membuka pintu gerbang dari dan ke daerah lain, membuka lapangan pekerjaan, mengurangi jarak tempuh dan waktu perjalanan, serta memudahkan pergerakan manusia dan muatan barang. Keberadaan transportasi menjadi salah satu penyokong kehidupan sehari-hari masyarakat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Transportasi juga mendukung peningkatan kualitas hidup masyarakat, meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional, serta mewujudkan kemandirian ekonomi dengan transportasi juga memegang peranan penting dalam perkembangan perekonomian nasional, sebab. menggerakkan sektor strategis ekonomi domestik. "Berbagai pembangunan infrastruktur kita lakukan, tak hanya di wilayah perkotaan tapi juga daerah pelosok. Selain itu, dapat meningkatkan perekonomian, hubungan antar daerah lebih baik, dan Indonesia bisa bersatu dengan adanya konektivitas," Pemerintah menyadari pentingnya peranan transportasi bagi keberlangsungan hidup masyarakat dan negara. Oleh karena itu, Bangka Belitung memiliki daerah-daerah terpencil yang cukup sulit dijangkau sehingga memerlukan sarana dan prasarana transportasi yang mumpuni untuk menghubungkan daerah-daerah tersebut. "Sentra-sentra pertumbuhan ekonomi baru didorong tumbuh sejalan dengan pembangunan infrastruktur. Pembangunan infrastruktur ini bukan hanya untuk menyambung konektivitas dan membuat perekonomian jadi lebih efisien, tapi juga mempersatukan Indonesia sebagai bangsa," Oleh karena itu pemberdayaan dan pengamanan terhadap masyarakat perlu terus ditingkatkan, dengan cara bekerjasama dan berkoordinasi dengan instansi antar organisasi perangkat daerah yang ada ataupun instansi vertikal yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sehingga terciptanya kedamaian masyarakat Bangka Belitung

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada dasarnya memuat rencana keuangan yang diperoleh dan digunakan pemerintah dalam rangka melaksanakan kewenangannya dalam penyelenggaraan pelayanan umum dalam satu anggaran, sesuai dengan pendekatan

kinerja dimana setiap alokasi biaya direncanakan harus dikaitkan dengan tingkat pelayanan atau hasil yang diharapkan dapat tercapai. Kinerja pemerintah daerah dapat diukur melalui evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran pendapatan belanja daerah, selanjutnya untuk mengukur kinerja keuangan pemerintah daerah mengembangkan standar analisa belanja, tolak ukur kinerja dan standar biaya.

Untuk itu dimasa yang akan datang baik sumber daya manusia, sarana prasarana, anggaran, kebijakan dan kinerja perlu ditingkatkan dan dikembangkan kearah yang lebih baik sehingga keberadaan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat bermanfaat dan berguna dalam menciptakan stabilitas keamanan yang ada di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ada pendapatan, belanja diarahkan untuk mendukung kebijakan yang telah ditetapkan dengan memperhatikan perbandingan antara masukan dan keluaran (efisiensi). Alokasi anggaran dilaksanakan secara terbuka berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan. Selain itu pengelolaan belanja harus diadministrasikan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Pengelolaan belanja sejak proses perencanaan, pelaksanaan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berupaya untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan, dengan cara mengimplementasi akuntansi pemerintah sesuai dengan aturan yang berlaku. Melalui peran Dinas Perhubungan Provinsi Bangka Belitung diharapkan kualitas laporan keuangan pada pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat ditingkatkan, yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Sesuai dengan rencana kerja Tahun 2020 Anggaran Murni Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 39.512.452.801,- (Tiga puluh Sembilan milyar lima ratus dua belas juta empat ratus lima puluh dua ribu delapan ratus satu rupiah) setelah Perubahan sebesar Rp. 20.835.286.405,00 (Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) maka kebijakan Keuangan Tahun 2020 diarahkan untuk melaksanakan Program dan Kegiatan:

1. Program Peningkatan Pelayanan Pemerintah (5 Kegiatan)
2. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan darat (3 Kegiatan)
3. Program Pengembangan dan Pembangunan Perhubungan laut (2 Kegiatan)
4. Program Peningkatan pengendalian Operasional dan Kebandarudaraan (1 Kegiatan)

2. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah adalah basis kas untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan dan basis akrual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran, pos-pos pendapatan, belanja dan pembiayaan disajikan berdasarkan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Dalam penyajian Neraca, pos-pos aset, kewajiban dan ekuitas disajikan berdasarkan basis akrual yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

Pengakuan dalam akuntansi adalah proses penetapan terpenuhinya kriteria pencatatan suatu kejadian atau peristiwa dalam catatan akuntansi sehingga akan menjadi bagian yang melengkapi unsur aset, kewajiban, ekuitas dana, pendapatan, belanja, dan pembiayaan, sebagaimana akan termuat pada laporan keuangan entitas pelaporan yang bersangkutan. Pengakuan diwujudkan dalam pencatatan jumlah uang terhadap pos-pos laporan keuangan yang terpengaruh oleh kejadian atau peristiwa terkait.

Kriteria minimum yang perlu dipenuhi oleh suatu kejadian atau peristiwa untuk diakui, yaitu:

- a. Terdapat kemungkinan bahwa manfaat ekonomi yang berkaitan dengan kejadian atau peristiwa tersebut akan mengalir keluar dari atau masuk ke dalam entitas pelaporan yang bersangkutan,
- b. Kejadian atau peristiwa tersebut mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur atau dapat diestimasi dengan andal.

Dalam menentukan apakah suatu kejadian/peristiwa memenuhi kriteria pengakuan, perlu dipertimbangkan aspek materialitas. Pengakuan Utang kepada pihak ketiga seperti utang pajak diakui setelah bendahara pengeluaran menerbitkan bukti pemotongan dan uang diterima. Persediaan diakui setiap akhir tahun anggaran dan piutang diakui setiap akhir tahun anggaran. Pengakuan Aset Tetap merupakan pengakuan terhadap perolehan aset yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang berkaitan dengan belanja modal.

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah.

A.4. Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi pemerintah sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 bahwa laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh entitas pelaporan. Tujuan umum laporan dan kinerja keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas memuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya, secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan pemerintah adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas entitas pelaporan atas sumber daya yang akan dipercayakan kepadanya.

Basis akuntansi Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menerapkan **Basis Akrua**l dalam penyusunan dan penyajian Neraca,LO dan LPE serta **Basis Kas** untuk penyusunan dan penyajian LRA. Kegiatan akuntansi pada satuan kerja Pemerintah daerah meliputi pencatatan atas pendapatan, belanja, aset dan selain kas. Proses tersebut dilaksanakan oleh PPK-SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung

Berdasarkan dokumen-dokumen sumber yang diserahkan oleh bendahara. Akuntansi belanja pada SKPD Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung ini meliputi akuntansi belanja UP (uang persediaan), GU (ganti uang), TU (tambah uang), dan akuntansi belanja LS (langsung).

Dokumen sumber yang dijadikan dasar dalam pencatatan transaksi belanja ini adalah sebagai berikut:

1. Belanja dengan mekanisme UP/GU/TU
 - Menyusun Kelengkapan dan Bukti Kwitansi Untuk Pengajuan Uang GU
 - Membuat SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Penelitian Kelengkapan Dokumen
 - Membuat SPM
 - Menerima SP2D
2. Belanja dengan mekanisme LS - SP2D
 - Menyiapkan berkas kontrak, Berita Acara Pembayaran, Berita Acara Hasil Pekerjaan dan Kelengkapan Pengajuan - SPD
 - Membuat dan Menghitung PPN dan PPH
 - Membuat SPP, Surat Pernyataan Pengajuan SPM, Surat Pernyataan Tanggungjawab Mutlak, Penelitian Kelengkapan
 - Membuat SPM
 - Menerima SP2D untuk dicairkan

Penyusunan dan penyajian laporan keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintah. Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1) Pendapatan – LRA

- Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Daerah (Kasda).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

2) Pendapatan - LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi.
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

3) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari Kas umum daerah.

- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Badan Keuangan Daerah (BAKUDA).
- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

4) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; dan terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

5) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/ Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang

menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil perhitungan fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
 - Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
 - Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TPA/TGR.
- a. Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah);
 - b. Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - c. Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
- Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus , ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.

- Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada penetapan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD .

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap. Kebijakan penyusutan aset tetap didasarkan pada Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan.
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Tabel 2. Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d 20 Tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d 50 Tahun
Jalan, Irigasi dan Jaringan	5 s.d 40 Tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat musik modern)	4 Tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan / dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan .
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap , dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan , aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat netto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi .
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

6) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung.

7) Ekuitas

Ekuitas merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

BAB II

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN REALISASI ANGGARAN (LRA)

B.1. Penjelasan Umum Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, dan pembiayaan, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode.

Informasi tersebut berguna bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya ekonomi, akuntabilitas dan ketaatan entitas pelaporan terhadap anggaran dengan:

- a. menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- b. menyediakan informasi mengenai realisasi anggaran secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- c. menyediakan informasi yang berguna dalam memprediksi sumber daya ekonomi yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara **komparatif**. Laporan Realisasi Anggaran dapat menyediakan informasi kepada para pengguna laporan tentang indikasi perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi:
 - (a). telah dilaksanakan secara efisien, efektif, dan hemat;
 - (b). telah dilaksanakan sesuai dengan anggarannya (APBN/APBD); dan
 - (c). telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Unsur-unsur Laporan Realisasi Anggaran (LRA) sebagai berikut:

1. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah atau oleh entitas pemerintah lainnya yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.
2. Belanja adalah semua pengeluaran oleh Bendahara Umum Negara/Bendahara Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
3. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.

4. Surplus/defisit-LRA
5. Pembiayaan adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyertaan modal oleh pemerintah.
6. Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SiLPA/SiKPA)

B.2. Penjelasan Pos Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode sampai dengan 30 Juni 2020.

Realisasi Pendapatan Daerah pada semester I TA 2020 adalah NIHIL berupa Pendapatan Daerah berupa pajak dan retribusi , hal ini di karenakan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung bukan OPD pengelola pendapatan Daerah maka realisasi pendapatan sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi Pendapatan-LRA sebesar Rp0,00

Realisasi Belanja pada semester I Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp.5.348.234.748,00- (Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Atau Mencapai *25.67%* Dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 20.835.286.405,00,- (*Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah*).

B.2.1 Pendapatan LRA

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tidak ditugaskan untuk mengelola pendapatan baik yang bersumber dari pendapatan pajak maupun retribusi daerah, sehingga tidak terdapat anggaran pendapatan dalam DPA Tahun Anggaran Anggaran 2020 atau Nihil.

B.2.2 Belanja

Realisasi Belanja pada semester I Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.348.234.748,00- (Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) Atau Mencapai 25,67% Dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 20.835.286.405,00,- (*Dua puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah*). Rincian realisasi belanja dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 7.985.103.172,- (*Tujuh Milyar Sembilan Ratus Delapan Puluh Lima Juta Seratus Tiga Ribu Seratus Tujuh Puluh Dua Rupiah*) Realisasi Sebesar Rp.3.638.420.587,00,- (*Tiga milyar enam ratus tiga puluh delapan juta empat ratus dua puluh ribu lima ratus delapan puluh tujuh rupiah*) atau Sebesar 45,57%. (*Empat puluh lima koma lima puluh tujuh persen*)

2. Belanja Barang dan Jasa

Belanja barang dan jasa dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2020 dianggarkan sebesar Rp. 6.975.332.733,- (*Enam milyar sembilan ratus tujuh puluh lima juta tiga ratus tiga puluh dua ribu tujuh ratus tiga puluh tiga rupiah*) Realisasi Sebesar Rp.1.515.389.161,00 (*Satu milyar lima ratus lima belas juta tiga ratus delapan puluh sembilan ribu seratus enam puluh satu rupiah*) atau Sebesar 21,72%. (*Dua puluh satu koma tujuh puluh dua persen*)

3. Belanja Modal

Belanja modal dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Semester I Tahun Anggaran 2020 Dianggarkan Sebesar Rp. 5.874.850.500,00,- (*Lima milyar delapan ratus tujuh puluh empat juta delapan ratus lima puluh ribu lima ratus rupiah*) realisasi Sebesar Rp. 194.425.000,00 (*Seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah*) atau Sebesar 3,31 % (*Tiga koma tiga puluh satu persen*)

Aset Tetap Tahun 2020 Sebesar Rp. 74.147.338.405,11 (Tujuh puluh empat milyar seratus empat puluh tujuh juta tiga ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus lima koma sebelas rupiah dan Pada Tahun 2019 sebesar Rp.

88.313.075.055,11 (Delapan puluh delapan milyar tiga ratus tiga belas juta tujuh puluh lima ribu lima puluh lima koma sebelas rupiah) Terdapat Pengurangan nilai Aset pada Tahun 2020 sebesar Rp. 14.165.736.650,00 (Empat belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus tiga puluh enam ribu enam ratus lima puluh rupiah)

B.3. Catatan Penting lainnya

Realisasi Pencapaian Target Keuangan pada Semester I Tahun Anggaran 2020 adalah sebesar Rp. 5.348.234.748,00- (Lima milyar tiga ratus empat puluh delapan juta dua ratus tiga puluh empat ribu tujuh ratus empat puluh delapan rupiah) atau Mencapai 25,67% Dari Alokasi Anggaran Sebesar Rp. 20.835.286.405,00,- (Dua Puluh milyar delapan ratus tiga puluh lima juta dua ratus delapan puluh enam ribu empat ratus lima rupiah) Pencapaian kinerja keuangan Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun anggaran 2020 tercantum pada tabel 4 dibawah ini :

Tabel 3.
Pencapaian Kinerja Keuangan Semester 1 TA 2020

NO	URAIAN BELANJA	ANGGARAN	REALISASI	% Realisasi
5	BELANJA	20.835.286.405,-	5.348.234.748,-	25,67
5.1	BELANJA OPERASIONAL	14.960.435.905,-	5.153.809.748,-	34,45
5.1.1	Belanja Pegawai	7.985.103.172,-	3.638.420.587,-	45,57
5.1.2	Belanja Barang dan Jasa	6.975.332.733,-	1.515.389.161,-	21,72
5.2	BELANJA MODAL	5.874.850.500,-	194.425.000,-	3,31
5.2.2	Belanja Modal Peralatan dan mesin	493.500.000,-	194.425.000,-	39,40
5.2.3	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	3.494.070.000,-	0	0
5.2.4	Belanja Modal Jalan Irigasi dan Jaringan	1.887.280.500,-	0	0

BAB III

PENJELASAN ATAS POS – POS NERACA

C.1. Penjelasan Umum Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada periode tertentu. Unsur neraca dalam basis akrual adalah:

- 1) Aset; sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.
- 2) Kewajiban; utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- 3) Ekuitas (tanpa dirinci lebih lanjut ke ekuitas dana lancar, ekuitas dana investasi, dan ekuitas dana cadangan sebagaimana dalam basis kas menuju akrual); kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

C.2. Penjelasan Per Pos Neraca

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode semester I Tahun 2020 atau periode 30 Juni 2020 sebagai berikut:

C.2.1 Aset

A. Aset Lancar

Penjelasan masing-masing pos aset lancar sebagai berikut :

1. Kas dan Setara Kas

Kas di Bendahara Pengeluaran Periode tanggal 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 909.747.164,- (*Sembilan ratus Sembilan juta tujuh ratus empat puluh tujuh ribu seratus enam puluh empat rupiah*)

2. Piutang

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki piutang sebesar Rp. 0,00.

3. Persediaan

Saldo akun ini menggambarkan jumlah persediaan barang yang mempunyai sifat habis pakai dan diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional,

serta barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual / diserahkan dalam rangka pelayanan masyarakat yang masih berada di Organisasi perangkat daerah.

Nilai persediaan diperoleh dari hasil perhitungan fisik per tanggal 30 Juni 2020, dikalikan dengan harga pembelian terakhir. Saldo persediaan pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung per 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 10.128.500,- (*Sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah*)

B. Aset Tetap

TABEL 4

Rincian Aset Tetap Per 30 Juni 2020 dan 31 Desember 2019

No	Uraian	31 Desember 2020	31 Desember 2019	Kenaikan (Peurunan)
1	Tanah	53.232.396 ,00	53.232.396,00	-
2	Peralatan dan Mesin	32.488.294.174,73	32.293.869.174,73	194.425.000
3	Gedung dan Bangunan	36.708.614.806,40	36.708.614.806,40	-
4	Jalan, Irigasi dan Bangunan	81.136.498.053,98	81.136.498.053,98	-
5	Aset Tetap Lainnya	2.557.484.000,00	2.557.484.000,00	-
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	0	0	-
7	Akumulasi Penyusutan	(78.796.785.026,00)	(64.436.623.375,81)	(14.360.161.650,19)
Jumlah Aset Tetap		74.147.338.405,11	88.313.075.055,11	14.165.736.650,00

Aset tetap adalah aktiva berwujud yang mempunyai manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap diperoleh dari dana yang bersumber dari sebagian atau seluruh APBD melalui pembelian, pembangunan, hibah atau donasi, pertukaran dengan aset lainnya dan dari sitaan atau rampasan.

Nilai aset Tetap dalam Neraca pada Semester I Tahun Anggaran 2020 setelah dilakukan penyesuaian dengan jumlah pada neraca tahun 2019 adalah sebesar Rp 74.147.338.405,11 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Koma Sebelas Rupiah*) yang merupakan nilai Perolehan (historis) ditambah nilai pada Kartu Inventaris Barang tahun 2019. Sedangkan perolehan aset dari belanja modal pada Tahun Anggaran 2019 realisasi sebesar *Rp.88.313.075.055,11,- (Delapan Puluh Delapan Milyar Tiga Ratus Tiga Belas Juta Tujuh Puluh Lima Ribu Lima Puluh Lima Koma Sebelas Rupiah).*

Pada realisasi belanja Modal Semester I Tahun 2020 sebesar Rp. 194.425.000,- (*Seratus Sembilan puluh empat juta empat ratus dua puluh lima rupiah*) dan penyusutan Aset sebesar Rp. 78.796.785.026 (*Tujuh puluh delapan milyar tujuh ratus Sembilan puluh enam juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu dua puluh enam rupiah*) hal tersebut yg diakibatkan harga perolehan yang berpengaruh terhadap nilai penyusutan aset sebelumnya, terdapat Pengurangan nilai Aset sebesar Rp. 14.360.161.650,00 (*Empat belas milyar tiga ratus enam puluh juta seratus enam puluh satu ribu enam ratus lima puluh rupiah*) Berdasarkan laporan neraca satuan kerja, bagian pembukuan membuat neraca konsolidasi dengan melakukan beberapa pengujian ulang dan telah dikoreksi kembali

➤ **Tanah**

Tanah Semester I Tahun 2020 sama dengan Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp 53.232.396,00,- (*Lima puluh tiga juta dua ratus tiga puluh dua ribu tiga ratus sembilan puluh enam rupiah*). tidak ada penambahan aset tanah pada Tahun Anggaran 2020

➤ **Peralatan dan Mesin**

☞ Alat alat Besar pada semester I Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp 1.322.191.500,- (*Satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) sedang pada semester II Tahun 2019 berjumlah Rp 1.322.191.500,- (*Satu milyar tiga ratus dua puluh dua juta seratus Sembilan puluh satu ribu lima ratus rupiah*) Tidak Terdapat Penambahan Aset Pada Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat alat Besar pada semester I Tahun Anggaran 2020

☞ Alat-alat Angkutan pada Semester I Tahun 2020 Sebesar Rp. 2.387.162.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delpan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*) sedangkan pada Semester II Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.387.162.000,- (*Dua Milyar Tiga Ratus Delpan Puluh Tujuh Juta Seratus Enam Puluh Dua Ribu Rupiah*). Tidak Terdapat Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat alat Angkutan sebesar

☞ Alat-alat Bengkel dan alat Ukur pada Semester I Tahun 2020 Sebesar Rp. 468.620.800- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah*) sedangkan pada Semester II Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 468.620.800- (*Empat Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam*

Ratus Dua Puluh Ribu Delapan Ratus Rupiah) Tidak ada Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat-alat Bengkel dan alat Ukur

☞ Alat-alat Kantor dan Rumah tangga pada semester I Tahun 2020 Sebesar Rp. 2.303.207.634,94 (*Dua Milyar Tiga Ratus Tiga Juta Dua Ratus Tujuh Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*) sedangkan pada Semester II Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 2.108.782.634,94 (*Dua Milyar Seratus Delapan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Empat Koma Sembilan Puluh Empat Rupiah*) Terdapat Penambahan Aset Tetap pada Alat-alat Kantor dan Rumah tangga pada Tahun 2020 Sebesar Rp. 194.425.000 (*Seratus Sembilan Puluh Empat Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah*)

☞ Alat-alat Studio dan Komunikasi pada semester I Tahun 2020 sebesar Rp. 400.003.000,- (*Empat Ratus Juta Tiga Ribu Rupiah*) Sedangkan pada Semester II Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp. 400.003.000,- (*Empat Ratus Juta Tiga Ribu Rupiah*) . Tidak Terdapat Penambahan Aset Tetap Peralatan dan Mesin pada Alat-alat Studio dan Komunikasi pada Tahun 2020.

☞ Alat-alat Kedokteran pada Semester I Tahun 2020 sebesar Rp.3.593.461.990,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*) dan pada Tahun Anggaran 2019 yaitu sebesar Rp.3.593.461.990,- (*Tiga Milyar Lima Ratus Sembilan Puluh Tiga Juta Empat Ratus Enam Puluh Satu Ribu Sembilan Ratus Sembilan Puluh Rupiah*). Tidak Terdapat Penambahan aset Alat-alat Kedokteran Tahun Anggaran 2020.

☞ Alat-alat Laboratorium pada Semester I Tahun 2020 sebesar Rp 30.585.000,- (*Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) Pada Semester II Tahun Anggaran 2019 Yaitu Sebesar Rp 30.585.000,- (*Tiga Puluh Juta Lima Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Rupiah*) Tidak Ada Penambahan Aset Alat-Alat Laboratorium Pada Tahun Anggaran 2020

☞ Komputer pada Semester I Tahun 2020 sebesar Rp 576.795.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) pada Semester II Tahun anggaran 2019 yaitu Sebesar Rp 576.795.000,- (*Lima Ratus Tujuh Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah*) Tidak Terdapat Penambahan Aset Komputer Pada Semester I Tahun Anggaran 2020.

☞ Rambu rambu pada Semester I Tahun 2020 sebesar *Rp 21.406.267.249,79,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan koma tujuh puluh Sembilan rupiah)* pada Semester II Tahun anggaran 2019 yaitu Sebesar *Rp 21.406.267.249,79,- (Dua puluh satu milyar empat ratus enam juta dua ratus enam puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh Sembilan koma tujuh puluh Sembilan rupiah)* Tidak Terdapat Penambahan Aset Rambu rambu Pada Semester I Tahun Anggaran 2020

➤ **Gedung dan Bangunan**

☞ Nilai Aset Bangunan Gedung pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp.32.912.247.806,40 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Koma Empat Puluh Rupiah)* dan Pada Semester II Tahun Anggaran 2019 Sebesar *Rp.32.912.247.806,40 (Tiga Puluh Dua Milyar Sembilan Ratus Dua Belas Juta Dua Ratus Empat Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Enam Koma Empat Puluh Rupiah)*.Tidak Terdapat Penambahan Aset Tetap Untuk Gedung Dan Bangunan Pada Bangunan Gedung pada Semester I Tahun 2020.

☞ Nilai Aset Bangunan Menara pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp. 3.796.367.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)* dan pada Semester II Tahun Anggaran 2019 Sebesar *Rp. 3.796.367.000 (Tiga Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tiga Ratus Enam Puluh Tujuh Ribu Rupiah)*. Tidak Terdapat penambahan dan pengurangan nilai aset Rambu rambu Pada Semester I Tahun 2020.

➤ **Jalan,Irigasi dan Jaringan**

☞ Jalan dan Jembatan pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp. 79.827.915.053,98,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah)* Sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 Berjumlah *Rp. 79.827.915.053,98,- (Tujuh Puluh Sembilan Milyar Delapan Ratus Dua Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Lima Belas Ribu Lima Puluh Tiga Koma Sembilan Puluh Delapan Rupiah)* Tidak Terdapat Penambahan Belanja Jalan Dan Jembatan Pada Semester I Tahun Anggaran 2020.

☐ Bangunan Air Dan Irigasi Pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp. 454.626.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)* Sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 Berjumlah *Rp. 454.626.000,- (Empat Ratus Lima Puluh Empat Juta Enam Ratus Dua Puluh Enam Ribu Rupiah)* Tidak Ada Penambahan Dan Pengurangan Belanja Bangunan Air Dan Irigasi Pada Tahun Anggaran 2020

☐ Instalasi pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp.839.032.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)* Sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 *Rp.839.032.000,- (Delapan Ratus Tiga Puluh Sembilan Juta Tiga Puluh Dua Ribu Rupiah)* Tidak Ada Penambahan Belanja Instalasi Pada Tahun Anggaran 2020

☐ Jaringan pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp.14.925.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)* sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 Berjumlah *Rp 14.925.000,- (Empat Belas Juta Sembilan Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah)* Tidak Terdapat Penambahan Dan Pengurangan Belanja Jaringan Pada Tahun Anggaran 2020

➤ **Asset Tetap Lainnya**

☐ Buku dan Perpustakaan pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp.499.575.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)* .Sedangkan Pada Tahun 2019 Berjumlah *Rp. 499.575.000,- (Empat Ratus Sembilan Puluh Sembilan Juta Lima Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah)* Tidak Terdapat Penambahan Dan Pengurangan Belanja Buku Perpustakaan Pada Tahun Anggaran 2020.

☐ Aset Tetap Renovasi pada Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp. 2.057.909.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah),* Sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 *Berjumlah Rp. 2.057.909.000,- (Dua Milyar Lima Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Sembilan Ribu Rupiah)* Tidak Terdapat Penambahan Dan Pengurangan Belanja Aset Tetap Renovasi Pada Semester I Tahun Anggaran 2020.

- **Aset Lainnya**

Mengacu pada Buletin Teknis SAP 02 tentang Penyusunan Neraca Awal Pemerintah Daerah, dinyatakan bahwa Aset lainnya merupakan aset Pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap dan dana cadangan Layaknya sebuah aset, aset lainnya memiliki peranan

yang cukup penting bagi pemerintah Daerah karena mampu memberikan manfaat ekonomis dan jasa potensial (Potential service) di masa depan.

Berbagai transaksi terkait aset lainnya seringkali memiliki tingkat materialitas dan kompleksitas yang cukup signifikan mempengaruhi laporan keuangan pemerintah daerah sehingga keakuratan dalam Pencatatan dan pelaporan menjadi suatu keharusan Semua standar akuntansi menempatkan aset lainnya sebagai aset yang penting dan memiliki karakteristik tersendiri baik dalam pengakuan, pengukuran maupun pengungkapannya. Aset lainnya adalah berupa aset yang rusak dan tidak layak lagi untuk dipakai dalam kegiatan administrasi perkantoran

Nilai aset Lainnya dalam neraca Semester I tahun 2020 sebesar *Rp.2.771.656.640,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)*. sedangkan Pada Semester II Tahun 2019 Berjumlah *Rp.2.771.656.640,- (Dua Milyar Tujuh Ratus Tujuh Puluh Satu Juta Enam Ratus Lima Puluh Enam Ribu Enam Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah)* Tidak Ada Pengurangan Nilai Aset Lainnya Tahun Anggaran 2020 .

- Penyusutan Aset Tetap

Penyusutan Aset sampai dengan Semester I tahun 2020 sebesar *Rp. 78.796.785.026,- (Tujuh Puluh Delapan Milyar Tujuh Ratus Sembilan Puluh Enam Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Lima Ribu Dua Puluh Enam Rupiah)* Sedangkan Penyusutan Aset Tahun 2019 Sebesar *Rp. 64.436.623.376,- (Enam puluh Empat milyar empat ratus tiga puluh enam juta enam ratus dua puluh tiga ribu tiga ratus tujuh puluh enam rupiah)*, terdapat penambahan penyusutan aset pada tahun 2020 sebesar *Rp. 27.734.890.463,- (Dua Puluh Tujuh Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus Sembilan Puluh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Tiga Rupiah)*. Dan Pengurangan Aset di tahun 2020 Sebesar *Rp.13.374.728.813 (Tiga Belas Juta Tiga Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Dua Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Tiga Belas Rupiah)*

Nilai pada Beban Penyusutannya pada LO sebesar *Rp. 27.734.890.463,- (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah)*. terdapat selisih pada dampak Akumulasi atas Perubahan nilai akumulasi Aset Tetap (LPE) sebesar *Rp. 13.374.728.812,81, (Tiga milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta tujuh ratus dua puluh delapan ribu delapan ratus dua belas koma delapan puluh satu rupiah)* dan Akumulasi Amortisasi Aset tak Terwujud Sebesar *Rp. 0 (Nol Rupiah)* , untuk aset lainnya sebesar *Rp. 1.561.656.640 (Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu enam*

ratus empat puluh rupiah). Hal Tersebut Diakibatkan Beberapa Faktor Yang Mempengaruhi Besarnya Penyusutan Aset Antara Lain:

- Faktor harga Perolehan dari tahun sebelumnya
- Faktor nilai aset pada masa penarikan dan penghentian Aset
- Faktor Umur sebagai bahan perhitungan yang berhubungan dengan kondisi fisik aset tetap

C. BARANG MILIK DAERAH NON NERACA

Saldo Barang Milik Daerah Non Neraca Berupa Ekstakompatabel Semester I Tahun 2020 Sebesar *Rp.6.943.076.712,99 (Enam milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)*, Sedangkan pada Semester II Tahun 2019 Sebesar *Rp. 6.943.076.712,99 Enam milyar Sembilan ratus empat puluh tiga juta tujuh puluh enam ribu tujuh ratus dua belas koma Sembilan puluh Sembilan rupiah)* Tidak Ada Pengurangan dan Penambahan Barang Milik Daerah Non Neraca pada Tahun Anggaran 2020 .

C.2.2 KEWAJIBAN

Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Pada Semester II Tahun 2020 Memiliki Kewajiban Jangka Pendek.

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Meliputi Utang Beban Tunjangan Tambahan Penghasilan Sebesar *Rp 315.324.000,- (Tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah)* yaitu Pembayaran Tunjangan Tambahan Penghasilan CPNS/PNS Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Beban Kerja untuk bulan Juni 2020 dibayarkan pada Bulan Juli 2020

C.2.3 EKUITAS

Akun ini menggambarkan jumlah kekayaan bersih yang dimiliki Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Saldo per 31 Desember 2019 adalah sebesar *Rp 76.313.546.709,11 (Tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan koma sebelas rupiah)*.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode semester I Tahun 2020 atau periode 30 Juni 2020.

Nilai Aset Semester I per 30 Juni 2020 dicatat dan disajikan sebesar Rp 76.628.870.709,11 (*Tujuh puluh enam milyar enam ratus dua puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh ribu tujuh ratus Sembilan koma sebelas rupiah*) yang terdiri dari Aset Lancar Persediaan Rp. 10.128.500 (Sepuluh juta seratus dua puluh delapan ribu lima ratus rupiah), Aset Tetap Rp. 74.147.338.405,11 (*Tujuh Puluh Empat Milyar Seratus Empat Puluh Tujuh Juta Tiga Ratus Tiga Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Lima Koma Sebelas Rupiah*) dan Aset Lain lain sebesar Rp. 1.561.656.640,00 (*Satu milyar lima ratus enam puluh satu juta enam ratus lima puluh enam ribu enam ratus empat puluh rupiah*)

Nilai Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp 315.324.000 (*Tiga ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh empat ribu rupiah*) dan Nilai Ekuitas sebesar Rp. 76. 313.546.709,11 (*Tujuh puluh enam juta tiga ratus tiga belas juta lima ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus Sembilan koma sebelas rupiah*)

Beban Penyusutan LO pada akumulasi Penyusutan akhir tahun dan akumulasi awal tahun terdapat perbedaan yaitu sebesar Rp. 18.184.514.307,19,- (Delapan belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh koma Sembilan belas rupiah) pada beban penyusutan dan Amortisi di tahun 2020 sebesar Rp. 27.734.890.463,00 (Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah) pada beban penyusutan dan amortisi di tahun 2019 Rp. 9.550.376.155,81, (Sembilan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima koma delapan puluh satu rupiah) hal ini merupakan harga perolehan beban penyusutan di tahun 2020 bertambah.

BAB IV

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. Ikhtisar Laporan Arus Kas

Laporan Arus Kas menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintah pusat/daerah selama periode tertentu.

Laporan arus kas menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama satu periode akuntansi, dan saldo kas setara kas pada tanggal pelaporan. Informasi ini disajikan untuk pertanggungjawaban dan pengambilan keputusan.

Manfaat informasi arus kas berguna sebagai indikator jumlah arus kas di masa yang akan datang, serta berguna untuk menilai kecermatan atas taksiran arus kas yang telah dibuat sebelumnya. Laporan arus kas juga menjadi alat pertanggung-jawaban arus kas masuk dan arus kas keluar selama periode pelaporan. Apabila dikaitkan dengan laporan keuangan lainnya, laporan arus kas memberikan informasi yang bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam mengevaluasi perubahan kekayaan bersih/ekuitas suatu entitas pelaporan dan struktur keuangan pemerintah (termasuk likuiditas dan solvabilitas)

D.2. Penjelasan Per Pos Laporan Arus Kas

Unsur yang dicakup dalam Laporan Arus Kas terdiri dari **penerimaan dan pengeluaran kas**, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke Bendahara Umum Negara/Daerah.
- b. Pengeluaran kas adalah semua aliran kas yang keluar dari Bendahara Umum Negara/Daerah.

Laporan arus kas adalah bagian dari laporan finansial yang menyajikan informasi penerimaan dan pengeluaran kas selama periode tertentu yang diklasifikasikan berdasarkan aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris.

Klasifikasi arus kas menurut aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris memberikan informasi yang memungkinkan para pengguna laporan untuk menilai pengaruh dari aktivitas tersebut terhadap posisi kas dan setara kas pemerintah.

Informasi tersebut juga dapat digunakan untuk mengevaluasi hubungan antar aktivitas operasi, investasi, pendanaan, dan transitoris. Satu transaksi tertentu dapat mempengaruhi arus kas dari beberapa aktivitas, misalnya transaksi pelunasan utang yang terdiri dari pelunasan pokok utang dan bunga utang. Pembayaran pokok utang akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas pendanaan sedangkan pembayaran bunga utang pada umumnya akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas operasi kecuali bunga yang dikapitalisasi akan diklasifikasikan ke dalam aktivitas investasi.

Dalam hal entitas bersangkutan masih membukukan penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas berdasarkan akun pelaksanaan anggaran maka laporan arus kas dapat disajikan dengan mengacu pada akun-akun pelaksanaan anggaran tersebut. Yang dimaksud dengan akun-akun pelaksanaan anggaran adalah akun yang berhubungan dengan pendapatan, belanja, transfer, pembiayaan, dan transaksi nonanggaran, yang dalam Laporan Arus Kas dikelompokkan menjadi aktivitas operasi, investasi aset nonkeuangan, pembiayaan, dan nonanggaran.

1. AKTIVITAS OPERASI

Aktivitas operasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Arus kas bersih aktivitas operasi merupakan indikator yang menunjukkan kemampuan operasi pemerintah dalam menghasilkan kas yang cukup untuk membiayai aktivitas operasionalnya di masa yang akan datang tanpa mengandalkan sumber pendanaan dari luar.

Arus masuk kas dari aktivitas operasi terutama diperoleh dari:

- (a) Penerimaan Perpajakan;
- (b) Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
- (c) Penerimaan Hibah;
- (d) Penerimaan Bagian Laba perusahaan negara/daerah dan Investasi Lainnya;
- (e) Penerimaan Lain-lain/penerimaan dari pendapatan Luar Biasa; dan
- (f) Penerimaan Transfer.

Arus keluar kas untuk aktivitas operasi terutama digunakan untuk:

- (a) Pembayaran Pegawai;
- (b) Pembayaran Barang;
- (c) Pembayaran Bunga;
- (d) Pembayaran Subsidi;
- (e) Pembayaran Hibah;

- (f) Pembayaran Bantuan Sosial;
- (g) Pembayaran Lain-lain/Kejadian Luar Biasa; dan
- (h) Pembayaran Transfer.

Jika suatu entitas pelaporan mempunyai surat berharga yang sifatnya sama dengan persediaan, yang dibeli untuk dijual, maka perolehan dan penjualan surat berharga tersebut diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi.

Jika entitas pelaporan mengotorisasikan dana untuk kegiatan suatu entitas lain, yang peruntukannya belum jelas apakah sebagai modal kerja, penyertaan modal, atau untuk membiayai aktivitas periode berjalan, maka pemberian dana tersebut harus diklasifikasikan sebagai aktivitas operasi. Kejadian ini dijelaskan dalam catatan atas laporan keuangan.

2. AKTIVITAS INVESTASI

Aktivitas investasi adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas.

Arus kas dari aktivitas investasi mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang.

Arus masuk kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Penjualan Aset Tetap;
- (b) Penjualan Aset Lainnya;
- (c) Pencairan Dana Cadangan;
- (d) Penerimaan dari Divestasi;
- (e) Penjualan Investasi dalam bentuk Sekuritas.

Arus keluar kas dari aktivitas investasi terdiri dari:

- (a) Perolehan Aset Tetap;
- (b) Perolehan Aset Lainnya;
- (c) Pembentukan Dana Cadangan;
- (d) Penyertaan Modal Pemerintah;
- (e) Pembelian Investasi dalam bentuk Sekuritas.

3. AKTIVITAS PENDANAAN

Aktivitas Pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan/atau pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang.

Arus kas dari aktivitas pendanaan mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan perolehan atau pemberian pinjaman jangka panjang.

Arus masuk kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Penerimaan utang luar negeri;
- (b) Penerimaan dari utang obligasi;
- (c) Penerimaan kembali pinjaman kepada pemerintah daerah;
- (d) Penerimaan kembali pinjaman kepada perusahaan negara.

Arus keluar kas dari aktivitas pendanaan antara lain:

- (a) Pembayaran pokok utang luar negeri;
- (b) Pembayaran pokok utang obligasi;
- (c) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada pemerintah daerah;
- (d) Pengeluaran kas untuk dipinjamkan kepada perusahaan negara.

4. AKTIVITAS TRANSITORIS

Aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan.

Arus kas dari aktivitas transitoris mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto yang tidak mempengaruhi pendapatan, beban, dan pendanaan pemerintah. Arus kas dari aktivitas transitoris antara lain transaksi Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), pemberian/penerimaan kembali uang persediaan kepada/dari bendahara pengeluaran, serta kiriman uang. PFK menggambarkan kas yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar atau diterima secara tunai untuk pihak ketiga misalnya potongan Taspen dan Askes. Kiriman uang menggambarkan mutasi kas antar rekening kas umum negara/daerah.

Arus masuk kas dari aktivitas transitoris meliputi penerimaan PFK dan penerimaan transitoris seperti kiriman uang masuk dan penerimaan kembali uang persediaan dari bendahara pengeluaran.

Arus keluar kas dari aktivitas transitoris meliputi pengeluaran PFK dan pengeluaran transitoris seperti kiriman uang keluar dan pemberian uang persediaan kepada bendahara pengeluaran.

BAB V

PENJELASAN ATAS POS – POS LAPORAN OPERASIONAL

E.1. Ikhtisar Laporan Operasional

Laporan Operasional merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Operasional menyediakan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

Tujuan pelaporan operasi adalah memberikan informasi tentang kegiatan operasional keuangan yang tercerminkan dalam pendapatan-LO, beban, dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan. Pengguna laporan membutuhkan Laporan Operasional dalam mengevaluasi pendapatan-LO dan beban untuk menjalankan suatu unit atau seluruh entitas pemerintahan, sehingga Laporan Operasional menyediakan informasi:

- 1) mengenai besarnya beban yang harus ditanggung oleh pemerintah untuk menjalankan pelayanan;
- 2) mengenai operasi keuangan secara menyeluruh yang berguna dalam mengevaluasi kinerja pemerintah dalam hal efisiensi, efektivitas, dan kehematan perolehan dan penggunaan sumber daya ekonomi;
- 3) yang berguna dalam memprediksi pendapatan-LO yang akan diterima untuk mendanai kegiatan pemerintah pusat dan daerah dalam periode mendatang dengan cara menyajikan laporan secara komparatif;
- 4) mengenai penurunan ekuitas (bila defisit operasional), dan peningkatan ekuitas (bila surplus operasional).

E.2. Penjelasan Per Pos Laporan Operasional

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-LO yang diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang dipersyaratkan menurut ketentuan perundangan yang berlaku, disajikan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Klasifikasi pendapatan-LO menurut sumber

pendapatan maupun klasifikasi beban menurut ekonomi, pada prinsipnya merupakan klasifikasi yang menggunakan dasar klasifikasi yang sama yaitu berdasarkan jenis. Laporan operasional Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung periode 31 Desember 2019 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

Tabel 5
Rincian Beban Operasional Per-31 Desember 2019

URAIAN	30 Juni 2020	31 Des 2019	Kenaikan (Penurunan)
Beban Pegawai-LO	3.662.048.587,00	7.503.674.810,00	(3.841.626.223,00)
Beban Persediaan	135.486.237,00	472.837.600,00	(337.351.363,00)
Beban jasa	874.301.264,00	4.064.682.314,00	(3.190.381.050,00)
Beban Pemeliharaan	566.381.024,00	1.035.449.757,75	(469.068.733,75)
Beban Perjalanan Dinas	362.365.441,00	1.929.141.204,00	(1.566.775.763,00)
Beban Penyusutan	27.734.890.463,00	9.550.376.155,81	18.184.514.307,19
Total Beban	(33.335.473.016,00)	(24.556.161.841,56)	(8.779.311.174,44)

1. Pendapatan LO

Realisasi Pendapatan untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. 0,00 atau mencapai 0,00% dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp. 0,00.

2. Beban

2.1 Beban Pegawai

Jumlah Beban pegawai untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebesar Rp. 3.662.048.587 (*Tiga milyar enam ratus enam puluh dua juta empat puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh rupiah*) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7.503.674.810 (*Tujuh milyar lima ratus tiga juta enam ratus tujuh puluh empat ribu delapan ratus sepuluh rupiah*) terdapat penurunan dari beban pegawai sebesar Rp. -3.841.626.223 (*minus tiga milyar delapan ratus empat puluh satu juta enam dua puluh enam ribu dua ratus dua puluh tiga rupiah*)

2.2 Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Desember 2020 Sebesar Rp. 135.486.237 (*Seratus tiga puluh lima juta empat*

ratus delapan puluh enam ribu dua ratus tiga puluh tujuh rupiah) dan 31 Desember 2019 Sebesar Rp. 472.837.600 (*Empat ratus tujuh puluh dua juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu enam ratus rupiah*) Terdapat Penurunan dari beban persediaan sebesar Rp. -337.351.363 (*Minus tiga ratus tiga puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh satu ribu tiga ratus enam puluh tiga rupiah*) Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai.

2.3 Beban Barang Dan Jasa

Jumlah Beban Barang dan Jasa di kelompokkan menjadi Beban Jasa, Beban Pemeliharaan dan Beban Perjalanan Dinas, untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 sebesar Rp. 1,803,047,729 (*Satu milyar delapan ratus tiga juta empat puluh tujuh ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah*) dan 31 Desember 2019 sebesar Rp. 7,029,273,275,75 (*Tujuh milyar dua puluh Sembilan juta dua ratus tujuh puluh tiga ribu dua ratus tujuh puluh lima koma tujuh puluh lima rupiah*) terdapat Penurunan dari beban Jasa Sebesar Rp. -5,226,225,546,75 (*Minus lima milyar dua ratus dua puluh enam juta dua ratus dua puluh lima ribu lima ratus empat puluh enam koma tujuh puluh lima rupiah*)

2.4 Beban Penyusutan Dan Amortisasi

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 Rp. 27.734.890.463 (*Dua puluh tujuh milyar tujuh ratus tiga puluh empat juta delapan ratus Sembilan puluh ribu empat ratus enam puluh tiga rupiah*) dan 31 Desember 2019 Rp. 9.550.376.155,81 (*Sembilan milyar lima ratus lima puluh juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu seratus lima puluh lima koma delapan puluh satu rupiah*) Jika dibandingkan dengan tahun 2019 beban penyusutan mengalami Penurunan sebesar Rp. 18.184.514.307,19,- (*Delapan belas milyar seratus delapan puluh empat juta lima ratus empat belas ribu tiga ratus tujuh koma Sembilan belas rupiah*)

Beban penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

2.5 Surplus/defisit dari kegiatan Operasional

Jumlah Defisit LO untuk Semester I periode yang berakhir pada 30 Juni 2020 adalah sebesar Rp. – 33.335.473.016 (*minus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga*

puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah) dan Pada Defisit LO periode 31 Desember Tahun 2019 Semester II Rp. – 24.556.161.841,56 *(Minus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh enam rupiah)*

Terdapat kenaikan jumlah Defisit LO sebesar Rp. -8.779.311.174,44 *(Minus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah)*

2.6 Surplus/defisit dari kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Semester I Tahun 2020 Sebesar Rp. – 33.335.473.016 *(minus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah)* dan 2019 adalah sebesar Rp. – 24.556.161.841,56 *(Minus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh enam rupiah)*, Terdapat kenaikan jumlah Defisit Non LO sebesar Rp. - 8.779.311.174,44 *(Minus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah)*

2.7 Pos luar biasa

Pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I Tahun 2020 terdapat pengurangan ekuitas dari pos luar biasa baik yang bersumber dari koreksi nilai persediaan, revaluasi aset tetap atau sumber-sumber lainnya Sebesar Rp. – 33.335.473.016 *(minus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah)* dan pada Semester II tahun 2019 adalah sebesar Rp. – 24.556.161.841,56 *(Minus dua puluh empat milyar lima ratus lima puluh enam juta seratus enam puluh satu ribu delapan ratus empat puluh satu koma lima puluh enam rupiah)* Terdapat Pengurangan sebesar Rp. -8.779.311.174,44 *(Minus delapan milyar tujuh ratus tujuh puluh Sembilan juta tiga ratus sebelas ribu seratus tujuh puluh empat koma empat puluh empat rupiah)*.

E.3. Catatan Penting Lainnya

Laporan Operasional menggambarkan posisi pendapatan dan beban, dimana pendapatan dan beban pada Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebesar Rp. – 33.335.473.016 (*minus tiga puluh tiga milyar tiga ratus tiga puluh lima juta empat ratus tujuh puluh tiga ribu enam belas rupiah*)

BAB VI

PENJELASAN ATAS LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

F.1 Ikhtisar Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan sekurang-kurangnya pos-pos ekuitas awal atau ekuitas tahun sebelumnya, surplus/defisit LO pada periode bersangkutan dan koreksi-koreksi yang menambah dan mengurangi ekuitas, yang antara lain berasal dari dampak kumulatif yang disebabkan perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan yang mendasar misalnya:

1. Koreksi kesalahan yang mendasar dari persediaan yang terjadi pada periode-periode sebelumnya
2. Perubahan Nilai aset tetap karena revaluasi aset tetap

Laporan Perubahan Ekuitas adalah Laporan merupakan laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah pusat/daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas Laporan menyediakan informasi mengenai selisih antara Aset dengan kewajiban dalam satu periode.

Tujuan pelaporan perubahan ekuitas adalah memberikan informasi tentang ekuitas awal, surplus/defisit LO, Dampak Akumulatif atas perubahan nilai aset tetap dan terakhir menggambarkan berapa besar ekuitas akhir.

F.2. Penjelasan Per Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Entitas pelaporan menyajikan pendapatan-Ekuitas awal yang merupakan saldo dari ekuitas akhir tahun sebelumnya diklasifikasikan menurut sumber pendapatan. Rincian lebih lanjut sumber pendapatan disajikan pada Catatan atas Laporan Keuangan. Entitas pelaporan menyajikan beban yang diklasifikasikan menurut klasifikasi jenis beban. Beban berdasarkan klasifikasi organisasi dan klasifikasi lain yang

Laporan Perubahan Ekuitas Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Semester I pada Tanggal 30 Juni 2020 memuat beberapa unsur sebagai berikut:

1. Ekuitas Awal

Ekuitas akhir 2019 akan menjadi ekuitas awal 2020. Ekuitas awal Dinas Perhubungan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Semester I tahun 2020 sebesar Rp . 82.722.960.882,47 (Delapan puluh dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat tujuh rupiah), dan ekuitas awal 2019 sebesar Rp . 82.722.960.882,47 (Delapan Puluh Dua milyar tujuh ratus dua puluh dua juta sembilan ratus enam puluh ribu delapan ratus delapan puluh dua koma empat tujuh rupiah)

SURPLUS/DEFISIT-LO

Jumlah Surplus/Defisit –LO Semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. -23.500.694.079,75,- (Minus dua puluh tiga milyar lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma tujuh lima) dan Semester II tahun anggaran 2019 adalah sebesar Rp -23.500.694.079,75,- (Minus dua puluh tiga milyar lima ratus juta enam ratus sembilan puluh empat ribu tujuh puluh sembilan rupiah koma tujuh lima)

DAMPAK KUMULATIF ATAS PERUBAHAN PENYUSUTAN ASET

Dampak kumulatif perubahan atas Perubahan Penyusutan Aset pada Semester I tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 3.977.438.050 ,-(Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah) sedangkan pada Semester II tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 3.977.438.050 ,-(Tiga milyar sembilan ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus tiga puluh delapan ribu lima puluh rupiah)

2. KOREKSI EKUITAS LAINNYA

Koreksi ekuitas lainnya tahun Anggaran 2020 Semester I adalah sebesar Rp – 260.743.500 (Minus dua ratus enam puluh juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah) sedangkan pada Semester II tahun 2019 sebesar Rp. – 260.743.500 (Minus dua ratus enam puluh juta tujuhn ratus empat puluh tiga ribu lima ratus rupiah)

EKUITAS AKHIR

Ekuitas akhir tahun anggaran 2020 Semester I adalah sebesar Rp 89.101.076.340,98 (Delapan puluh sembilan milyar seratus satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh koma sembilan delapan rupiah)sedangkan pada Semester II tahun 2019 sebesar Rp. 89.101.076.340,98 (Delapan puluh sembilan milyar seratus satu juta tujuh puluh enam ribu tiga ratus empat puluh koma sembilan delapan rupiah)